



## **Trajectory Konstruksi Jilbab di Indonesia: Pertarungan Beragam Kepentingan**

### ***The Trajectory of Hijab Construction in Indonesia: A Battle of Diverse Interests***

**Lailia Dhiah Indriani**

*Prodi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*

#### **Author's email:**

Email:

lailliadhiahindriani@mail.ugm.ac.id

#### **Keywords:**

*Discourse, hijab, interest, social construction, piety, trajectory*

#### **Kata kunci:**

Jilbab, konstruksi sosial, kesalehan, kepentingan, wacana

**Abstract:** *The Construction of the Hijab in Indonesia is often associated with religious aspects. Hijab is frequently used to indicate a person's level of piety. Based on this assumption, specific standards have emerged in society to judge women. However, the hijab is a religious symbol and closely connected to cultural aspects. Over time, the construction of hijab has been monopolized by certain institutions, obscuring its original discourse closely tied to the culture. Social construction in society has influenced the meaning of hijab in Indonesia. Therefore, this research aims to unravel the trajectory of hijab in Indonesia and its socio-political implications. The theoretical framework employed is a social construction by Berger & Luckman. The research is conducted qualitatively, with data collected through literature review and documentation. The findings reveal that the hijab, a piece of cloth to cover the head, has transformed into a symbol of piety used as a commodity and a specific political symbol. The construction of hijab ultimately serves various interests due to the diverse contexts underlying its construction, as well as the actors and interests involved.*

**Abstrak:** Konstruksi jilbab di Indonesia sering dikaitkan dengan aspek agama. Jilbab sering digunakan untuk menunjukkan tingkat kesalehan seseorang. Dari anggapan tersebut, pada akhirnya, lahir standar khusus dalam masyarakat dalam menilai perempuan. Padahal, jilbab tidak hanya menjadi penanda agama, melainkan juga dekat dengan aspek budaya. Seiring berkembangnya waktu, konstruksi jilbab dimonopoli institusi tertentu sehingga mengaburkan wacana asli jilbab yang erat dengan kebudayaan tersebut. Konstruksi sosial di masyarakat telah mempengaruhi makna jilbab di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membongkar trajektori jilbab di Indonesia serta gencatan ekonomi politiknya. Adapun teori yang digunakan adalah social construction dari Berger & Luckman. Penelitian dilakukan secara kualitatif. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jilbab yang awalnya berupa selembar kain untuk menutup kepala, kini berubah menjadi simbol penanda kesalehan yang digunakan sebagai alat komoditas serta simbol politik tertentu. Konstruksi jilbab pada akhirnya melayani beragam aspek kepentingan karena konteks yang melatarbelakangi konstruksi atas jilbab itu yang beragam. Pun dengan aktor dan kepentingan yang menyertainya.

## PENDAHULUAN

Menjadi negara dengan populasi kelompok muslim yang dominan, menjadikan Indonesia dan jilbab tidak dapat dipisahkan. Jilbab sendiri kini sering digunakan untuk menentukan standar kesalihan seseorang perempuan muslim (Safri, 2014). Hal ini secara tidak langsung menghadirkan oposisi biner yang membedakan perempuan berjilbab dan tidak berjilbab. Melalui bineritas ini, hadir anggapan bahwa perempuan berjilbab dianggap lebih baik dibanding dengan yang tidak berjilbab (Yulikhah, 2017). Atas dasar ini, mulai muncul penilaian dan standar baru terhadap perempuan, misalnya, laki-laki meletakkan standar pasangan hidup baru, yakni wajib berjilbab. Tidak berhenti di situ, standar ini juga didukung oleh narasi media dan propaganda politik tertentu. Film *Ayat-Ayat Cinta* seri pertama yang booming, misalnya, menghadirkan gambaran perempuan berjilbab beserta sifat-sifat “baik” yang melekat padanya. Semua itu cukup untuk membuat perempuan berlomba untuk menjadi versi lebih baik dengan mengenakan jilbab. Bersama dengan hal ini, wacana jilbab kemudian bertransformasi dari yang mulanya sekadar kain penutup kepala menjadi kain penanda tingkat kesalihan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba membongkar bagaimana masyarakat mengonstruksi wacana jilbab di Indonesia.

Konstruksi sosial atau *social constructionism* merupakan sikap anti-realis dan relativis (Hammersley, 2018). Konstruksi sosial memandang pengetahuan dan realitas sebagai sesuatu yang diciptakan dan didikonstruksikan oleh masyarakat. Dalam memahami konstruksi sosial yang terjadi di masyarakat, terdapat dua hal penting yang tidak bisa diabaikan, yakni “realitas” dan “pengetahuan”. Kedua hal inilah yang kemudian menjadi inti dari teori *social constructionism* (Berger & Luckmann, 1991). Kedua inti teori ini yang akan digunakan untuk

membaca perjalanan penggunaan jilbab di Indonesia, serta kelindan wacana yang dibentuk bersamaan dengan melejitnya fenomena jilbab di Indonesia. Adapun penelitian terdahulu yang berkenaan dengan jilbab salah satunya dilakukan oleh (Yulikhah, 2017) dengan judul “Jilbab Antara kesalehan dan Fenomena Sosial”. Secara keseluruhan, penelitian ini berbicara perihal alasan hadirnya jilbab di tengah masyarakat serta alasan-alasan kenapa jilbab digunakan (Yulikhah, 2017). Peneliti lebih menekankan kepada ayat-ayat tentang jilbab dan tidak mengkaitkannya dengan fenomena di Indonesia.

Penelitian selanjutnya yang berbicara perihal jilbab hadir dengan judul “Pergeseran Mitologi Jilbab: Dari Simbol Status ke Simbol Kesalehan/Keimanan) yang ditulis oleh (Safri, 2014). Penelitian ini membahas perihal mitos-mitos yang ada di belakang jilbab dan sejarah Islam yang melatarbelakangi. Kajian tentang jilbab yang dibahas pada penelitian ini tidak fokus pada masalah di Indonesia, melainkan pada konteks global ketika perintah jilbab itu muncul. Perbedaan penelitian Arif Nur Safri dengan penelitian pada artikel ini tentu pada segi kajian dan teori yang digunakan. Penelitian Safri (Safri, 2014) menggunakan teori mitologi Roland Barthes dan berfokus pada membongkar mitos-mitos dalam jilbab.

Penelitian lain tentang jilbab datang dari Suhendra (2013) dengan judul “Konstruksi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Alquran”. Fokus pada penelitian ini ialah berbicara perihal bagaimana jilbab dikonstruksi oleh individu sehingga lepas dari nilai-nilai Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran makna konstruksi Jilbab menurut Islam dalam Alquran dengan apa yang terjadi di masyarakat saat ini (Suhendra, 2013). Perbedaan penelitian milik Suhendra (2013) dengan penelitian ini ialah pada peletakan konstruksi jilbab. Konstruksi jilbab pada penelitian Suhendra (2013) lebih

menekankan pada bagaimana Alquran meletakkan definisi dari jilbab dan bagaimana individu menafsirkannya secara berbeda. Penelitian ini tidak lagi berbicara perihal dalil-dalil Alquran, melainkan pada konstruksi sosial yang melatarbelakangi wacana jilbab di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, kebaharuan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya terletak pada bagaimana fokus penelitian dan teori yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya lebih berfokus pada nilai-nilai Islam dan trajektori munculnya perintah jilbab, penelitian ini bergerak ke arah yang berbeda, yakni melihat bagaimana konstruksi masyarakat terhadap jilbab, dan bagaimana konstruksi itu menghadirkan berbagai wacana tertentu? Dari fokus penelitian tersebut, tujuan penelitian ini ialah membongkar bagaimana konstruksi sosial yang mengiringi wacana jilbab di Indonesia. Tujuan selanjutnya ialah menunjukkan bahwa jilbab tidak hanya sekadar selembar kain penutup kepala, melainkan di belakangnya tersimpan berbagai kepentingan yang mengikutinya.

## KERANGKA TEORI

### Wacana Jilbab di Indonesia Masa Kini

Wacana jilbab di Indonesia masa kini sering dikaitkan sebagai simbol untuk mengukur kesalehan perempuan Islam (Safri, 2014). Perempuan berjilbab akan dinilai memiliki adab, perilaku, serta tutur kata yang lebih baik disbanding dengan perempuan yang tidak berjilbab. Dari hal tersebut, pada akhirnya, lahir standarisasi baru di masyarakat yang menitikberatkan pada perempuan berjilbab sebagai standar baku dalam memilih dan menilai perempuan Islam (Yulikhah, 2017). Ini melahirkan diskriminasi terhadap perempuan Islam yang tidak mengenakan jilbab atau yang mengenakan jilbab tidak sesuai standar. Diskriminasi ini salah satunya muncul melalui, misalnya, bahwa berjilbab lebar memiliki tingkat keimanan lebih tinggi dari

mereka yang berjilbab pendek dengan warna mencolok (Hidayat, 2022). Dari diskriminasi ini, akan memicu beragam konflik lain yang hadir di belakangnya. Adanya pengkotak-kotakan jilbab dan non jilbab ini turut serta didukung dengan media yang menyebarkan wacana kesalehan. Majalah *Ummi*, misalnya, mereka melahirkan standar baru bagi perempuan muslim. Mereka yang *modesty* and *sanctity*, yaitu muslimah yang memiliki jiwa *humble* dan menyenangkan bagi orang lain, juga tetap mempertahankan keyakinan dan kesalehan melalui simbol jilbab (Pamungkas, 2015). Dengan kata lain, jilbab menjadi penanda kesalehan (Rianto, 2021).

Selain pada ranah *fashion*, wacana jilbab sebagai simbol kesalehan seseorang juga masuk ke institusi pendidikan dan politik. Pada institusi pendidikan, hal ini tercermin lewat aturan yang mengharuskan siswa perempuan untuk menggunakan Jilbab (Iqbal, 2021). Hal ini dibuktikan dengan munculnya aturan di salah satu sekolah di Padang, Sumatera Barat, yang kerap mewajibkan siswa perempuan untuk mengenakan jilbab termasuk yang tidak beragama Islam (Iqbal, 2021). Akhirnya, jilbab menjadi standar baru bagi kaum perempuan baik yang beragama Islam maupun tidak. Jilbab menjelma menjadi aturan yang wajib ditaati oleh semua perempuan (Siregar, 2016).

Adapun pada ranah politik, jilbab dimanfaatkan untuk menyukseskan sebuah kampanye politik tertentu. Wacana jilbab sebagai simbol kesalehan dibawa oleh politisi perempuan agar terlihat “saleh” di hadapan publik. Pada akhirnya, menjelang pesta politik, banyak politisi perempuan yang kemudian mengenakan jilbab dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan keimanan, hingga untuk mendapat simpati publik (Handarini, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa wacana kesalehan dalam jilbab sangat kental di kalangan masyarakat Indonesia. Inilah yang kemudian melahirkan berbagai gejolak termasuk pada ranah politik (Azizah & Armoyu, 2019).

Melihat berbagai fenomena di atas, kesalehan yang diletakkan pada jilbab telah melahirkan berbagai problematika. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut mengenai makna jilbab yang sesungguhnya untuk mematahkan standarisasi dalam menilai tingkat keimanan perempuan.

### **Teori *Social Constructionism* Berger & Luckman**

Teori *social constructionism* atau konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang secara umum menjelaskan mengenai realitas sosial adalah sebuah hasil konstruksi sosial dari individu. Teori ini pertama dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam pandangan teori ini, individu ialah makhluk bebas yang melakukan hubungan dengan manusia lain. Individu bukanlah sebuah korban dari produksi fakta sosial, melainkan bertindak sebagai media produksi dan reproduksi makna yang kemudian mengkonstruksikan dunia sosial berdasarkan kepentingan tertentu dan diyakini sebagai realitas (Basrowi & Sukidin, 2002).

Adapun mengenai konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) sendiri merupakan sebuah proses sosial yang dilakukan melalui berbagai tindakan maupun interaksi antar individu. Pada tahap ini, individu secara terus-menerus menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Poloma, 2004). Oleh karena itu, antara dunia pengalaman individu dan dunia sosial tidaklah bisa dipisahkan (Berger & Luckmann, 1991). Jadi, bisa dikatakan bahwa realitas sosial itu merupakan sebuah realitas subjektif dari kehidupan sehari-hari individu (Hammersley, 2018).

Dalam melihat realitas sosial sendiri, Berger dan Luckmann (1991) membaginya ke dalam tiga bentuk. *Pertama*, realitas sosial objektif. Realitas objektif ialah sebuah definisi yang kompleks dari realitas (termasuk ideologi dan kepercayaan) serta fenomena sosial seperti

tindakan dan tindakan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering dianggap sebagai fakta oleh individu. *Kedua*, realitas sosial simbolik. Realitas sosial simbolik adalah bentuk representasi simbolis dari realitas objektif yang lazim dikenal dalam bentuk karya seni, fiksi, berita media, dan lain-lain. *Ketiga*, realitas sosial subjektif. Realitas sosial subjektif ialah realitas sosial individu yang muncul dari realitas sosial objektif dan realitas. Sosial simbolik ini merupakan konstruksi dari definisi realitas yang dimiliki oleh individu, dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki setiap individu menjadi dasar untuk melakukan proses eksternalisasi, proses interaksi sosial dengan individu lain dalam struktur sosial.

Selain memperbincangkan perihal realitas sosial yang kompleks, teori konstruksi sosial Berger & Luckman juga erat kaitannya dengan dialektika dan konstruksi pengetahuan. Dalam pandangan teori ini, konstruksi pengetahuan diciptakan oleh interaksi individu dalam masyarakat (Berger & Luckmann, 1991). Oleh karena itu, tugas pokok sosiologi pengetahuan ialah menjelaskan dialektika yang terjadi antara diri (self) dan realitas sosio kultural. Adapun dialektika ini terjadi dalam tiga proses "*moment*". *Pertama*, eksternalisasi. Ini merupakan bentuk penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk dari manusia. *Kedua*, objektivasi. Ini merupakan interaksi sosial yang terjadi di dalam intersubjektif yang mengalami proses institusionalisasi. *Ketiga*, internalisasi. Proses ini ketika individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga maupun organisasi sosial tempat individu menjadi anggota di dalamnya (Berger & Luckmann, 1991).

Teori konstruksi sosial pada akhirnya memegang dua kata kunci utama, yakni "realitas" dan "pengetahuan". Realitas merupakan suatu keadaan di mana terdapat fenomena yang memiliki keberadaan (being) yang tergantung pada kehendak individu, sedangkan pengetahuan diartikan sebagai

kepastian bahwa fenomena itu benar-benar nyata (*real*) dan memiliki karakteristik tertentu. Keduanya ini membentuk realitas sosial yang merupakan hasil eksternalisasi dari internalisasi dan objektifikasi terhadap pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan empat asumsi dasar teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Nicklas Luckmann (Berger & Luckmann, 1991). *Pertama*, realitas merupakan hasil dari ciptaan individu atau manusia atas kondisi sosial yang terjadi di sekitarnya. *Kedua*, hubungan antara manusia dan konteks sosial di mana pemikiran itu timbul, selalu berkembang dan dilembagakan. *Ketiga*, kehidupan masyarakat dikonstruksi secara terus menerus. *Keempat*, membedakan secara jelas antara realitas dan pengetahuan. Dari empat asumsi dasar ini, teori konstruksi sosial dapat digunakan untuk membaca berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, digunakan untuk membaca konstruksi jilbab di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Teori yang menjadi dasar analisis penelitian ini ialah teori *social constructionism* Berger & Luckman. Pada proses pengumpulan data,

peneliti menggunakan metode dokumentasi dan pustaka. Adapun untuk objek penelitiannya ialah berbagai berita yang ditayangkan media maupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan narasi jilbab di Indonesia. Data dianalisis dengan mendasarkan pada tema dan konstruksi jilbab. Selanjutnya, data dipaparkan secara kronologis sesuai dengan pergeseran konstruksi jilbab di Indonesia. Konteks dipertimbangkan guna memahami secara lebih baik konstruksi jilbab di Indonesia dari waktu ke waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena jilbab di Indonesia memang tidak pernah jauh dari kontroversi. Dari awal kedatangannya, jilbab telah membawa wacana tersendiri di kalangan muslim. Pada akhirnya, jilbab tidak hanya sekadar kain penutup kepala yang digunakan oleh perempuan muslim, melainkan juga diromantisasikan, dijadikan komoditas, serta dimanfaatkan sebagai alat politik dengan mengatasnamakan Islam dan kesalihan. Pada era modern, jilbab bahkan menjelma menjadi semacam trend fashion tertentu, lengkap dengan stigma yang membersaminya. Jilbab pun telah melahirkan berbagai hirarki dan relasi kuasa di tengah masyarakat. Uraian berikut memaparkan beberapa “gencatan” historis wacana jilbab yang terjadi di Indonesia.

### Kerudung sebelum “jilbab”: Menelusuri Penemuan Kata “jilbab”



**Gambar 1.** Kerudung Perempuan Muhammadiyah  
Sumber: Pecihitam.org

Jauh sebelum kata jilbab muncul, Indonesia sebenarnya telah lebih dulu mengenal konsep kerudung. Kerudung ini umumnya berupa kain selendang panjang yang digunakan oleh perempuan muslim untuk menutupi bagian kepala (terkadang dililitkan hingga ke leher) (Al-Asymawi, 2003). Konsep menutup aurat dengan kerudung ini mulai berkembang bersamaan dengan kembalinya ulama yang belajar di tanah suci. Mereka pulang membawa ajaran Islam yang didapat di sana. Salah satu ajarannya adalah kewajiban menutup aurat bagi perempuan muslim. Hal ini berkaitan dengan cara berpakaian perempuan pada saat itu yang cenderung terbuka dan tidak menggunakan penutup kepala (Tantowi, 2010). Akhirnya, kerudung mulai diperkenalkan untuk membuat perempuan yang tadinya berpakaian terbuka ini, mau menutup auratnya berdasarkan ajaran Islam.

Ajaran ini pun dipraktikkan oleh berbagai penguasa Islam dari berbagai daerah seperti Minangkabau dan Sulawesi Selatan. Pada saat itu, masyarakat Minangkabau tidak menutup aurat dan cenderung berpakaian terbuka. Hal ini akhirnya menghadirkan berbagai kemaksiatan di masyarakat. Karena itu, Islamisasi akhirnya dilakukan. Perempuan yang berpakaian terbuka “ditertibkan” dengan aturan jilbab dan cadar untuk mengurangi terjadinya kemaksiatan. Perjuangan pemberlakuan jilbab ini juga banyak terjadi pada perang paderi berlangsung (Radjab, 1964). Selain Minangkabau, Sulawesi juga tak ingin ketinggalan dalam hal pemberlakuan jilbab bagi perempuan. Salah satu contohnya adalah Raja Arung Matoa wojo yang berkuasa pada 1821-1825. Ia mewajibkan perempuan muslim untuk menggunakan kerudung setiap hari serta menetapkan hukuman berdasarkan hukum Islam (Pelras, 1985). Menyusul Minangkabau dan Sulawesi, Sunda juga turut memeriahkan Islamisasi pada 1870an dengan diperkenalkannya mukena. Konsep mukena ini dipilih sebagai jalan tengah bagi perempuan muslim yang masih enggan mengenakan jilbab

pada kesehariannya agar tetap bisa beribadah. Dengan adanya mukena, pelan-pelan perempuan mulai menutup auratnya meskipun hanya saat menjalankan ibadah Sholat (Tantowi, 2010).

Seorang peneliti bernama Jean Gelman Taylor (2008), pernah mengungkapkan bahwa perempuan Aceh telah mengenakan kerudung pada 1880-1890an yang dibuktikan melalui foto-foto. Barulah sekitar 1980an, kata jilbab mulai dikenal luas sebagai kerudung panjang yang menutup kepala hingga ke dada (Yulikhah, 2017). Jika dilihat lebih detail, proses ini berhubungan dengan revolusi Iran yang terjadi pada 1979, dan memberi dampak penyebaran nilai-nilai Islam hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Seiring berkembangnya Islam di Indonesia, organisasi-organisasi Islam pun mulai bermunculan. Hal ini juga secara tidak langsung mendukung wacana jilbab. Muhammadiyah, misalnya, sejak 1910an, telah mulai misi penutupan aurat perempuan secara bertahap. Ini dilakukan untuk membedakan dan memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Awalnya, mereka meminta para perempuan untuk menggunakan kerudung (selendang), dengan tetap memperlihatkan sebagian rambutnya. Kemudian, mereka mengganti kerudung itu dengan “kudung sarung” yang terbuat dari Bombay (mirip seperti sarung yang biasa dipakai laki-laki). Setelah kudung sarung, kain penutup kepala ini terus bertransformasi hingga akhirnya menutup seluruh rambut perempuan. Tak kalah dengan Muhammadiyah, organisasi Persis juga memulai misi yang sama, tetapi dalam bentuk lebih ekstrim. Persis mewajibkan anggota perempuannya untuk mengenakan kerudung yang tak hanya menutup rambut, tapi juga lengkap dengan cadar yang menutup wajah. Hal ini memunculkan kecaman di tengah masyarakat (Tantowi, 2010). Setelah Persis mendapat kecaman, masyarakat NU mulai datang dengan membawa wacana kerudung yang lebih fleksibel. Melalui Kongres

NU XIII di Banten pada 1938, NU cabang Surabaya mengusulkan kewajiban menutup aurat bagi perempuan dengan menggunakan kerudung model Rangkajo Rajuna Said (Ryansyah, 2015). Melalui penelusuran ini, dapat disimpulkan bahwa kemunculan jilbab yang dimulai dari kerudung ini pada awalnya dilakukan agar perempuan muslim yang sebelumnya berpakaian terbuka, mau menutup auratnya. Konstruksi sosial tentang jilbab yang

berlaku pada periode ini ialah jilbab digunakan untuk membuat perempuan menutup aurat sesuai ajaran Islam dan membedakan antara perempuan dan laki-laki muslim. Hal ini berhubungan erat dengan Islamisasi yang terjadi di seluruh Indonesia. Perkembangan Jilbab pun kian dinamis dan lebih ditujukan bukan sebagai simbol kesalihan, melainkan sebagai penanda perempuan Muslim.

### **Pelarangan Jilbab, “Reformasi”, Hingga Bom Bali**



**Gambar 2.** Siswa berjilbab masa Orde Baru

**Sumber:** Historia

Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari trajektori jilbab di Indonesia. Pada era ini, berbagai simbol agama dan etnis yang dirasa bisa mengancam dan menggerus nilai-nilai nasionalisme, mendapat kecaman yang cukup keras dari pihak pemerintah. Salah satunya diwujudkan melalui pelarangan penggunaan jilbab di institusi pendidikan (Nuraeni & Gumilar, 2021). Pada 1981, pemerintah Orde Baru mulai melakukan gerakan pembasmian besar-besaran terhadap gerakan radikalisme Islam. Imbasnya, berbagai masjid kampus turut dicurigai menyebarkan isu radikalisme yang mengancam keutuhan negara (Jo, 2018). Pembasmian gerakan radikalisme Islam ini akhirnya juga turut menyerang para perempuan berjilbab. Pada awal 1982, seorang siswi berjilbab SMA N 1 Jember dikeluarkan atas dasar pelanggaran terhadap aturan pakaian disekolah (Nurlatifah, 2019).

Pelarangan ini dilakukan salah satunya dipengaruhi oleh revolusi Iran 1979 yang mewajibkan para perempuan untuk menutup aurat. Revolusi Iran ini turut menyebarkan ideologi keislaman ke berbagai daerah (Sunesti, 2014). Ideologi keislaman ini pun akhirnya masuk ke Indonesia dan menjadi ketakutan tersendiri di benak pemerintahan Orde Baru. Mereka khawatir jika sikap yang terlalu pro dengan keislaman akan menggerus nasionalisme dan menumbangkan rezim Orde Baru (Sunesti, 2014). Oleh karena itu, jilbab sebagai salah satu simbol keislaman tidak boleh dikenakan oleh perempuan muslim di ruang publik, termasuk sekolah (Jo, 2018).

Pelarangan hijab di institusi pendidikan ini tentu mendapat pertentangan dari organisasi masyarakat pada saat itu. Muhammadiyah adalah salah satu yang menolak narasi ini

(Alatas, 2002). Sejak awal pelarangan, Muhammadiyah bersama dengan MUI terus berupaya mencari jalan keluar. Salah satu solusi yang diberikan ialah sekolah Muhammadiyah akan menampung siswi-siswi yang dikeluarkan dari sekolah akibat menggunakan jilbab (Alatas, 2002).

Selain penolakan dari Muhammadiyah, banyak aktivis yang pada akhirnya menggunakan jilbab sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Berbagai demonstrasi mewarnai Indonesia sepanjang peraturan tentang jilbab ini dikeluarkan (Alatas, 2002). Meskipun begitu, peraturan tentang pelarangan jilbab ini pada akhirnya luluh bersamaan dengan sikap pemerintah yang mulai melihat kekuatan masyarakat Islam sehingga akan sangat menguntungkan jika berhasil mendapatkan simpatinya. Salah satu jalan yang ditempuh Orde Baru untuk merangkul kekuatan muslim adalah dengan menyetujui pendirian Ikatan Cendekia Muslim tahun 1990 dan mengeluarkan Surat Keputusan nomor 100/C/Kep/D/ tahun 1991. Pada surat keputusan tersebut, diterangkan bahwa institusi pendidikan boleh mengenakan jilbab (Mahabarata, 2019).

Jatuhnya rezim Orde Baru membawa reformasi tak hanya dalam hal ketatanegaraan, melainkan juga berbagai tindakan masyarakat. Peraturan-peraturan dan stigma yang khas Orde Baru berlahan mulai ditepis, termasuk sentimen terhadap agama dan ras tertentu. Reformasi ini juga berdampak cukup signifikan terhadap fenomena jilbab di tanah air. Jilbab yang awalnya dilarang dan sebagai simbol perlawanan politik, kini mulai bebas dikenakan. Setiap orang memiliki otoritas atas apa yang

akan dikenakan olehnya, termasuk pilihan untuk mengenakan jilbab di ruang publik. Kebebasan berjilbab ini disambut gembira oleh berbagai kalangan muslim. Inilah yang kemudian menjadi titik kebangkitan organisasi muslim di Indonesia yang sempat padam sejak kekuasaan Orde Baru (Atikah, 2017).

Islamisasi pasca Orde Baru terlihat melalui munculnya partai politik Islam, organisasi Islam, sekolah Islam, Perda Syariah, Bank Syariah. Selain itu, adapula perkembangan mengenai kebudayaan populer syariah yang turut mewarnai wacana islamisasi pasca Orde Baru. Hal ini terwujud melalui berbagai sinema dan tayangan televisi yang bertema Islami (Heryanto, 2015).

Khusus untuk organisasi muslim, wacana jilbab berkembang dan memiliki karakteristiknya sendiri. Beberapa organisasi mulai menempatkan standar berpakaian tertentu bagi anggotanya. Perempuan Muhammadiyah, misalnya, yang memiliki ketentuan jilbab yang menutupi kepala sampai ke dada, sedangkan baju itu dari leher hingga ke bawah (Hasyim, 2017). Tidak kalah dengan Muhammadiyah, Salafi juga memiliki ciri khas berjilbabnya sendiri. Jilbab yang dikenakan perempuan salafi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran, yakni penutup kepala baik berupa niqab maupun qurba yang menutup seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk cadar, bersifat opsional (Mahanani et al., 2019). Berkembangnya jilbab bersama dengan kebangkitan organisasi muslim ini pun tak lepas dari stigma yang melekat di belakangnya. Apalagi setelah adanya BOM Bali 1 dan BOM Bali 2.



**Gambar 3.** Jilbab dan Terorisme  
**Sumber:** Manado.Tribunnews.com

Bisa dikatakan bahwa BOM Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 dan memakan korban jiwa hingga 202 orang adalah momen sentimen terhadap perempuan muslim pertama setelah tumbang rezim Orde Baru. Pada saat fenomena BOM Bali ini terjadi, media tidak hanya menayangkan pelaku dan korban saja, melainkan juga menayangkan istri-istri dari pelaku pengeboman ini. Dari situlah, masyarakat tau bahwa keluarga teroris terdakwa BOM Bali berisikan perempuan dengan jilbab Panjang dan bercadar (Mukhti, 2021). Semenjak ini, stigma perempuan berjilbab panjang di Indonesia kian buruk. Masyarakat meletakkan stereotipe bahwa perempuan dengan jilbab panjang dan bercadar selalu dekat dengan aktivitas terorisme. Stereotipe ini bahkan masih berlanjut hingga hari ini. Apalagi peristiwa serupa kembali terjadi pada bom bunuh diri di Bandung dengan

salah satu pelakunya adalah perempuan berjilbab panjang dan bercadar.

Dari bagian trajektori ini, dapat disimpulkan bahwa jilbab awalnya dikonstruksikan sebagai simbol ketakutan pemerintah akan dominasi kelompok muslim yang dapat menggoyahkan rezim serta sebagai alat pemberontakan terhadap rezim. Setelah reformasi, organisasi Islam kian berkembang begitu juga dengan jilbab. Jilbab digunakan sebagai simbol kebebasan umat muslim. Kebebasan ini berbuah menjadi stigma negatif yang melekat pada perempuan berjilbab setelah bom Bali. Akhirnya, jilbab kembali menjelma menjadi simbol ketakutan (lebih spesifik mengenai ketakutan terhadap terorisme). Pada trajektori ini, aspek politik dan identitas keIslaman mewarnai wacana jilbab di Indonesia.

## Sinema Islami dan Tren Jilbab Masa Kini



**Gambar 4.** Tren jilbab Ayat-Ayat Cinta

**Sumber:** Viu.com

Sinema hampir tak pernah absen membawa tren baru dalam masyarakat, tak terkecuali tren jilbab beserta wacana tentang kesalahan perempuan. Kemunculan film-film bernuansa Islami nyatanya turut andil dalam transformasi jilbab di Indonesia. Seperti dikatakan Heryanto (Heryanto, 2015), film merupakan salah satu gerakan Islamisasi pasca Orde Baru yang muncul dalam bingkai budaya visual pop berbasis Islam. Adapun film yang populer dengan tema Islam ini tayang pada tahun 2008, yakni film *Ayat-Ayat Cinta 1* dan melejit di pasaran. Kesuksesan film ini kemudian diikuti oleh film-film seperti, *Ketika Cinta Bertasbih* (2009), *Perempuan Berkalung Sorban* (2009), *Sang Pencerah* (2010), *Hafalan Sholat Delisa* (2011), *Negeri 5 Menara*, (2012), *Ayat-Ayat Cinta 2* (2013), *Syurga yang Tak Dirindukan* (2015) dan masih banyak lagi. Pada 2008-2015an, menjadi tahun kejayaan film Islami di Indonesia. Film-film ini menampilkan cara berpakaian baru sekaligus memunculkan wacana perempuan muslim “yang seharusnya”. Film *Ayat-Ayat Cinta* menjadi titik awal ketenaran dan mulai lakunya simbol Islam yang

dipadu-padankan dengan budaya modern (Putri, 2020). Perempuan kemudian berlomba-lomba untuk menjadi seperti Aisyah di *Ayat-Ayat Cinta* yang teguh keIslamannya. Baik dari segi bersikap maupun berpakaian. Bersamaan dengan ini, konsep jilbab ala Timur Tengah sempat menjadi fenomenal. Orang berlomba untuk bisa meniru model jilbab yang mereka kenakan.

Setelah keberhasilan film *Ayat-Ayat Cinta* (2008) dalam menggerakkan perempuan muslim untuk meniru model jilbab tertentu, industri fashion di Indonesia digegerkan dengan jilbab “Zaskia Meccca”, sebuah gaya baru yang tetap bisa tampil modis meskipun berjilbab. Pada saat itu, pasar tradisional, toko, bahkan brand ternama seperti Rabbani mengeluarkan jilbab yang mirip dikenakan oleh Zaskia di film *Syurga Yang Tak Dirindukan*. Setelah fenomena ini, jilbab kemudian mulai lebih dikenal terutama oleh kalangan pemuda. Berbagai model jilbab pun menjadi berkembang dengan pesat dan mewarnai stasiun-stasiun televisi.



**Gambar 5.** Tren jilbab Zaskia Mecca

**Sumber:** Kompas

Wacana tentang jilbab kemudian terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perwujudan jilbab sebagai salah satu trend fashion, menumbuhkan wacana baru di tengah masyarakat. Dari yang awalnya jilbab digunakan untuk menunjukkan identitas muslim, berubah menjadi sekadar mengikuti *trend fashion* yang dibentuk oleh media dan penggerak ekonomi baru. Budaya populer telah memangkas wacana keagamaan jilbab dan industri hiburan (Atikah, 2017). Tak hanya berhenti di situ, sekolah-sekolah negeri kemudian membuat format seragam baru khusus untuk perempuan yang ingin mengenakan jilbab. Hal ini terus berlanjut hingga hingga kini, ketika fenomena jilbab benar-benar menguasai masyarakat tanpa pengenal usia hingga akhirnya mampu dibaca dengan baik oleh industri kapitalis.

### **Euforia “Halal” dan Hijrah Selebriti**

Tren jilbab yang disuguhkan oleh media, dimanfaatkan dengan baik oleh industri kapitalis. Kata “jilbab” kemudian diromantisasikan dan dikaitkan dengan wacana halal dan *syar’i* untuk meningkatkan nilai jual sebuah komoditas tertentu. Beragam *brand*

mulai mengeluarkan produk khusus untuk perempuan berhijab. Sunslit dan Rejoice adalah dua produk sampo awal yang membawa narasi ini. Mereka menampilkan model iklan berjilbab dan mengklaim bahwa produknya halal. Setelah iklan ini, muncullah berbagai brand yang ikut membuat produk khusus hijab lengkap dengan narasi halal.

Tren halal ini memberi sumbangsih besar terhadap wacana jilbab. Jilbab kemudian memiliki standar halal tersendiri yang disebut dengan jilbab *syar’i*. Jilbab *syar’i* adalah model jilbab yang lebar, panjang, dan menutup bagian dada perempuan (tak jarang jilbab baru dikatakan *syar’i* jika memanjang hingga ke pinggang). Adanya jilbab *syar’i* ini menyebar begitu cepat mulai 2016an. Salah satu yang mempercepat penyebarannya adalah komunitas jilbab bernama *Hijabers Community* yang tersebar di seluruh Indonesia dan rombongan hijrah selebriti. Rombongan hijrah selebriti adalah mereka yang menyatakan dirinya sudah “hijrah” dengan mengubah cara berpakaianya dengan menambahkan jilbab untuk menutup kepala. Beberapa selebriti yang termasuk jajaran awal dari “hijrah selebriti” adalah Shiren Sungkar, Zaskia Sungkar, Laudia Cintia

Bella, Kartika Putri, Annisa Soebandono, dan beberapa deretan selebriti papan atas lain. Mereka yang memang memiliki banyak *followers* ini kemudian “mempromosikan” model jilbab *syar’i* yang tetap *stylish* dengan *outfit* mereka.

Tidak berhenti di situ, para selebriti juga tak ketinggalan dalam “mengembangkan” pasar tren jilbab *syar’i*. Melalui dalih “menyebarkan salah satu ajaran agama”, mereka kemudian membuat *brand fashion* muslim sendiri dengan harga yang cukup tinggi di pasaran. Setiap selebriti yang berjilbab ini jika diamati memiliki pola yang mirip. Pertama

mereka akan mulai mengunggah wajah berjilbab di media. Ketika kolom komentar dibanjiri dengan pujian dan berbagai pendapat, mereka mulai mendeklarasikan secara terbuka bahwa mereka telah berhijrah sembari menceritakan proses hijrah yang dramatis itu. Setelah itu, mereka mulai rajin menunggah foto OOTD lengkap dengan model jilbab tertentu. Saat itulah, orang-orang akan mulai bertanya tentang jilbab yang mereka kenakan, ini adalah titik ketika selebriti akan memperkenalkan brand baru mereka. Bisa dikatakan bahwa narasi hijrah dan jilbab menjadi gerbang awal terbukanya bisnis baru, yakni “bisnis *brand fashion* yang *syar’i*”.



**Gambar 6.** Selebriti Hijabers

**Sumber:** Liputan 6

Pada fase ini, jilbab telah berkelindan dengan aspek ekonomi sehingga masyarakat semakin sulit untuk menentukan alasan orang mengenakan jilbab. Jilbab dalam hal ini harus dipahami tidak hanya sebagai tanda hijrah-karena hijrah tentu tidak cukup dilihat dari sekadar mengganti model jilbab- melainkan juga sebagai produk komoditas baru yang sangat menguntungkan. Simbol keIslaman dan kesalihan tidak begitu terlihat perbedaannya di tengah gempuran tren jilbab selebriti yang

menguasai pasar. Jilbab telah berevolusi menjadi komoditas bernilai jual tinggi.

### **212 dan Jilbab Politisi**

Membicarakan jilbab di Indonesia tidak bisa lepas dari peristiwa 212 pada 2016 silam. Demo besar-besaran ini dibarengi dengan banyak narasi di belakangnya. Tidak hanya agama, melainkan juga menjadi panggung untuk berbagai kepentingan. Kepentingan politik tentu tidak bisa lepas dari

perhatian. Berangkat dari demo dengan tujuan mengawal hukuman terdakwa dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama (Ahok), kelompok 212 terus mengadakan reuni secara rutin. Umumnya reuni dilakukan bertepatan dengan musim politik seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Biasanya, mereka akan mengusung satu calon

yang berasal dari latar belakang yang sama, yakni Islam berkategori tertentu. Pada Pilkada mereka mendukung Anies Baswedan sedangkan pada Pilpres mereka mendukung Prabowo. Hal seperti inilah yang kemudian menjustifikasi bahwa 212 bukan lagi urusan membela agama, tapi lebih dekat dengan urusan politik.



**Gambar 7.** Jilbab di acara 212

**Sumber:**Pojoksatu.co

Dekatnya fenomena 212 dengan politik dimanfaatkan dengan baik oleh para politisi. Tren politisi berjilbab pun mulai menguasai panggung politik. Para politisi ini tiba-tiba mengenakan jilbab menjelang pesta demokrasi untuk mendapatkan simpati dari masyarakat muslim (khususnya aktivis 212). Melalui jilbab, mereka membangun citra sebagai sosok yang baik dan taat beragama. Dari perubahan penampilan ini, masyarakat yang kebanyakan

muslim dan menganggap jilbab sebagai simbol kesalihan, akan lebih mudah terprofokasi dan berakhir pada terpilihnya kadidat ini (Handarini, 2015). Apalagi kelompok 212 didominasi oleh Islam kanan yang mendukung wacana Jilbab *syar'i* bagi perempuan. Jilbab pada pengertian ini dipahami sebagai alat politik yang mengatasmakan agama. Politisi berjilbab dianggap memiliki citra yang lebih baik karena dekat dengan nilai ke-Tuhan-an.



**Gambar 8.** Jilbab politisi

**Sumber:** Populis.id

Para politisi perempuan ini mengenakan jilbab untuk mendukung kontestasi politiknya. Mereka berpandangan bahwa dengan menjadi lebih religius, mereka akan lebih mudah mendapatkan suara untuk kepentingan politik (Candraningrum, 2013).

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa konstruksi tentang jilbab di Indonesia dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang ada. Pada tahap awal kemunculan jilbab, misalnya, jilbab dikonstruksikan sebagai sebuah alat Islamisasi. Pasalnya, pada 80an hingga awal 90-an, perempuan muslim di Indonesia masih berpakaian terbuka (Tantowi, 2010). Akhirnya, jilbab digunakan untuk membuat para perempuan menutup auratnya sesuai ajaran Islam, setidaknya ketika mereka melakukan ibadah shalat.

Konstruksi sosial perihal jilbab sebagai bentuk Islamisasi ini kemudian bergeser ketika masa pemerintahan Orde Baru. Pada Orde Baru, konstruksi sosial jilbab lebih mengarah pada isu-isu nasionalisme dan radikalisme (Jo, 2018). Hal ini disebabkan salahsatunya karena rezim Orde Baru menilai bahwa jilbab adalah bentuk radikalisme yang bisa mengancam

rezim (Sunesti, 2014). Jadi, pelarangan-pelarangan pun dilakukan di berbagai institusi. Pada masa Orde Baru pula, konstruksi sosial jilbab juga tak lepas dari simbol perjuangan yang dilakukan oleh organisasi muslim yang menolak pelarangan jilbab. Setelah rezim Orde Baru tumbang, jilbab digunakan sebagai simbol kebebasan umat muslim. Namun, kebebasan ini berbuah menjadi stigma negatif yang melekat pada perempuan berjilbab setelah bom Bali. Akhirnya, jilbab kembali dikonstruksikan sebagai simbol ketakutan (lebih spesifik mengenai ketakutan terhadap terorisme). Pada trajektori ini, aspek politik dan identitas keIslaman mewarnai wacana jilbab di Indonesia.

Konstruksi sosial tentang jilbab juga didukung oleh bagaimana media membingkai dan mengonstruksikan wacana ini. Salah satu fenomena yang turut membentuk persepsi masyarakat dalam mengonstruksikan jilbab adalah film *Ayat-Ayat Cinta 1* yang tayang pada 2008. Setelah film yang menampilkan perempuan berjilbab ala timur tengah ini, konstruksi sosial tentang jilbab turut bergeser. Jilbab kini digunakan sebagai standar dalam

menilai kesalehan perempuan (Rianto, 2021). Konstruksi sosial ini kemudian bergeser kembali dengan munculnya “hijaber selebriti” dengan berbagai mode. Selebriti yang memiliki power di masyarakat ini, membuat wacana kesalehan jilbab, berkamufase menjadi sebuah tren berbusana. Jilbab dikonstruksikan sebagai sebuah cara berpakaian baru di masyarakat.

Setelah menjadi tren berbusana, wacana jilbab terus berkembang bersamaan dengan isu yang mengiringinya. Salah satu isu besar yang membuat jilbab dikonstruksikan sebagai alat politik identitas adalah peristiwa 212. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh politisi untuk membentuk citra diri. Jilbab yang sangat dekat dengan muslim (punya suara mayoritas), akhirnya dimaknai sebagai sebuah alat pembentuk citra dan perjuangan politik (Candraningrum, 2013).

## **KESIMPULAN**

Di Indonesia, konsep jilbab pertama muncul bersamaan dengan kedatangan Islam. Penamaan jilbab awalnya lebih familiar dengan istilah kerudung. Beberapa perempuan muslim mulai menggunakan kerudung (semacam kain selendang untuk menutup kepala) hingga masa Orde Baru. Kerudung yang menjadi identitas keagamaan tertentu, kemudian dilarang karena adanya isu nasionalisme yang berlebihan. Pada era reformasi, akhirnya kebebasan untuk berjilbab menjadi semakin berkembang. Narasi jilbab sebagai pertanda kesalihan muncul sekitar tahun 2008an bersamaan dengan melejitnya film *Ayat-Ayat Cinta* yang membawa segudang imaji tentang bagaimana menjadi perempuan “yang baik dan sholehah (salih)”. Anggapan ini terus berkembang hingga hari ini. Stigma Jilbab sebagai simbol

kesalihan didukung oleh berbagai wacana seperti kemunculan organisasi Islam setelah revolusi Iran, hijab selebriti, hingga peristiwa 212. Lambat laun, jilbab banyak digunakan hanya untuk mengikuti tren fashion yang dikembangkan oleh media dan kelompok kapitalis. Tidak berhenti di situ, aspek politik juga tak ingin kalah dari pergulatan tentang jilbab ini. Politisi perempuan yang secara mendadak menggunakan jilbab pada ceramah tertentu menjadi salah satu contoh yang nyata.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa wacana jilbab yang saat ini populer sebagai simbol kesalihan tidak bisa begitu saja dimaknai sebagai kebenaran. Pasalnya, wacana jilbab ini telah dikonstruksikan sedemikian rupa oleh masyarakat dengan berbagai kepentingan di belakangnya. Dalam selembar kain jilbab terdapat berbagai relasi kuasa, ekonomi, politik, serta kelas sosial yang saling bertaut.

Alih-alih menjadi simbol kesalihan dan resolusi akidah, jilbab lebih dekat dengan wacana ekonomi dan resistensi politik. Sehingga masyarakat dirasa perlu untuk melihat lebih kritis terhadap fenomena jilbab ini. Terlebih jika jilbab digunakan oleh mereka yang punya kuasa tertentu. Selain itu, sentiment terhadap mereka yang tidak menggunakan jilbab sesuai “standar” kesyar’ian tertentu seyogyanya perlu diminimalisir. Hal ini disebabkan oleh perbedaan motivasi orang dalam mengenakan jilbab dan aliran Islam mana yang dianut. Karena sejak awal kedatangannya, jilbab sangat dinamis dan bertaut dengan kondisi sosio kultural yang berlaku, sehingga kurang tepat jika panjang pendeknya jilbab digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kesalihan seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asymawi, M. S. (2003). *Kritik atas jilbab* (N. D. Mahmada, Ed.). Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation.
- Alatas, A. (2002). *Revolusi jilbab: Kasus pelarangan jilbab di SMA Negeri se-Jabodetabek Tahun 1982-1991*. Al 'tishom.
- Atikah, P. (2017, May 15). *Jilbab dan kebangkitan pasca orde baru*. Medan Headline.  
<https://medanheadlines.com/2017/11/22/jilbab-dan-kebangkitan-pasca-orde-baru/>
- Azizah, N., & Armoyu, M. (2019). Politisasi hijab pada pemilihan kepala daerah langsung. *Humanisma Journal of Gender Studies*, 3(2), 114–128.
- Basrowi, & Sukidin. (2002). *Metode penelitian perspektif mikro: Grounded theory, fenomenologi, etnometodologi, etnografi, dramaturgi, interaksi simbolik, hermeneutik, konstruksi sosial, analisis wacana, dan metodologi refleksi*. Insan Cendekia.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The social construction of reality*. Penguin Books.
- Candraningrum, D. (2013). *Negotiating women's veiling*. Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine.  
<https://doi.org/10.4000/books.irasec.981>
- Hammersley, M. (2018). *Routledge revivals: What's wrong with ethnography? (1992)*. Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9781351038027>
- Handarini, E. (2015). *Jilbab di panggung politik: Studi profil perempuan berjilbab anggota DPRD Kab. Bantul* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hasyim, N. I. (2017). *Jilbab menurut Nahdadul Ulama, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah di Kota Makassar* [Skripsi]. UIN Alauddin Makassar.
- Heryanto, A. (2015). *Identitas dan kenikmatan: Politik budaya layar Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hidayat, I. (2022, April 19). *Jilbab, stigma dan standarisasi keshalehahan perempuan muslimah*. Mubadalah.Id Inspirasi Keadilan Relasi.  
[https://mubadalah.id/jilbab-stigma-dan-standarisasi-perempuan-muslimah/#Jilbab\\_dan\\_Hijab\\_Bukan\\_Tanda\\_Kesalehan](https://mubadalah.id/jilbab-stigma-dan-standarisasi-perempuan-muslimah/#Jilbab_dan_Hijab_Bukan_Tanda_Kesalehan)
- Iqbal, M. (2021). Wajah baru pendidikan Islam Indonesia: Jilbab, toleransi dan SKB 3 Menteri. *Qalamuna -Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2).
- Jo, H. (2018, February 28). *Jilbab terlarang di era orde baru ketika memakai jilbab dianggap sebagai sikap melawan oleh rezim orde baru*. Historia (Masa Lampau Selalu Aktual).  
<https://historia.id/kultur/articles/jilbab-terlarang-di-era-orde-baru-6k4Xn/page/1>
- Mahabarata, Y. (2019, November 26). *Cara orde baru melihat hijab sebagai ancaman kekuasaan*. Voi.Id.  
<https://voi.id/memori/418/cara-orde-baru-melihat-hijab-sebagai-ancaman-kekuasaan>
- Mahanani, P. A. R., Abdullah, I., & Noviani, R. (2019). Estetisasi jilbab syar'i jama'ah salafi: Studi kasus di Pondok Pesantren Imam Muslim Kota Kediri. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 3(1), 65–78.  
<https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.1.3415>

- Mukhti, S. (2021). Pengaruh penggunaan cadar terhadap kondisi psikologis mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 68–75. <https://doi.org/10.57251/hij.v1i1.86>
- Nuraeni, L., & Gumilar, S. (2021). Pelarangan dan perjuangan: pemakaian jilbab bagi kalangan pelajar pada masa orde baru tahun 1982-1991. *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 18(2), 163–175. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v18i2.15119>
- Nurlatifah, E. (2019). *Jilbab dan Islam Indonesia masa orde baru (1982-1991)* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah .
- Pamungkas, A. S. (2015). *The dakwah media in post Suharto Indonesia: From politics of identity to popular culture (The Case of Ummi)*. Universität Zu Berlin.
- Pelras, C. (1985). Religion, tradition and the dynamics of Islamization in South-Sulawesi. *Archipel*, 29(1), 107–135. <https://doi.org/10.3406/arch.1985.2226>
- Poloma, M. (2004). *Sosiologi kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Putri, R. D. (2020). Representasi identitas muslimah modern “Jilbab Traveler” dalam Novel Karya Asma Nadia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(2), 117–132. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.2.5878>
- Radjab, M. (1964). *Perang paderi di Sumatra Barat (1803-1838)*. Balai Pustaka.
- Rianto, P. (2021). Moralitas kebaikan dan kesalehan di seputar tubuh dan pakaian dalam ruang media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 221. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i2.4512>
- Ryansyah, A. (2015). Perjalanan panjang jilbab di Indonesia. *Majalah Jejal Islam Ed. Kiprah Muslimah Di Panggung Sejarah*.
- Safri, A. N. (2014). Pergeseran mitologi jilbab (Dari simbol status ke simbol kesalehan/keimanan). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 19. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.19-28>
- Siregar, M. (2016). Jilbab(isasi) dengan kekuasaan sebagai wacana yang diperebutkan. *AnImage Jurnal Studi Kultural*, 1(1), 16–20.
- Suhendra, A. (2013). Konstruksi identitas melalui pergeseran interpretasi hijab dan jilbab dalam Al-Quran. *PALASTREN*, 6(1), 1–22.
- Sunesti, Y. (2014). Ruang publik dan ekspresi keberagaman perempuan berhijab di Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(2), 1–11. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/45>
- Tantowi, A. (2010). The quest of Indonesian muslim identity: Debates on veiling from the 1920s to 1940s. *Journal of Indonesian Islam*, 4(1), 62–90.
- Yulikhah, S. (2017). Jilbab antara kesalehan dan fenomena sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 96. <https://doi.org/10.21580/jid.v36.1.1627>

